

Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar di Kabupaten Gowa: Analisis Politik Pendidikan

Febrianto Syam^{1*}, Asri Nur Aina², Novayanti Sophia Rukmana³ 

¹ Department Ilmu Politik, Universitas Islam Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

^{1,2} Department Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Makassar, Makassar, Indonesia

Article Info

Keywords:

Merdeka Belajar; Education Politics; Policy Implementation; Gowa Regency; Education Decentralization

ABSTRACT

The implementation of the Merdeka Belajar (Freedom to Learn) policy as a national education reform presents unique dynamics at the regional level, particularly in the context of local education politics. This study aims to analyze the implementation of the Merdeka Belajar policy in Gowa Regency, focusing on the educational political aspects that influence its implementation effectiveness. Using a qualitative approach with systematic literature review method, the research analyzes policy documents, educational statistics, and scientific literature from 2019-2024. The results show that 60% of schools have implemented the program, with implementation success heavily influenced by the interaction between political, technical, and social factors. Local government political support through a 15% budget increase serves as an important catalyst, but infrastructure limitations and implementer capacity variations remain significant challenges. The education forum plays an effective role in bridging communication between schools and communities and mobilizing local resources. Program development projections require strengthening in digital infrastructure, mentoring mechanisms, incentive systems, and collaborative networks. Implementation success will depend on the local government's ability to align strategic initiatives with local contexts and needs coherently and sustainably.

Informasi Artikel

Kata Kunci:

Merdeka Belajar; Politik Pendidikan; Implementasi Kebijakan; Kabupaten Gowa; Desentralisasi Pendidikan

ABSTRAK

Implementasi kebijakan Merdeka Belajar sebagai reformasi pendidikan nasional menghadirkan dinamika unik di tingkat daerah, khususnya dalam konteks politik pendidikan lokal. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan Merdeka Belajar di Kabupaten Gowa dengan fokus pada aspek politik pendidikan yang mempengaruhi efektivitas implementasinya. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literature review sistematis, penelitian menganalisis dokumen kebijakan, data statistik pendidikan, dan literatur ilmiah periode 2019-2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 60% sekolah telah mengimplementasikan program, dengan keberhasilan implementasi sangat dipengaruhi oleh interaksi antara faktor politik, teknis, dan sosial. Dukungan politik pemerintah daerah melalui peningkatan anggaran 15% menjadi katalis penting, namun keterbatasan infrastruktur dan variasi kapasitas implementator masih menjadi tantangan signifikan. Forum pendidikan berperan efektif dalam menjembatani komunikasi antara sekolah dan masyarakat, serta memobilisasi sumber daya lokal. Proyeksi pengembangan program membutuhkan penguatan pada aspek infrastruktur digital, mekanisme pendampingan, sistem insentif, dan jejaring kolaborasi. Keberhasilan implementasi akan bergantung pada kemampuan pemerintah

daerah dalam menyelaraskan inisiatif strategis dengan konteks dan kebutuhan lokal secara koheren dan berkelanjutan.

Article History

Received : 03 Desember 2024

Accepted : 03 Desember 2024

Published : 09 Desember 2024

DOI:**1. PENDAHULUAN**

Transformasi pendidikan di Indonesia memasuki babak baru dengan diperkenalkannya kebijakan Merdeka Belajar oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019. Kebijakan ini hadir sebagai respons terhadap tuntutan global akan sistem pendidikan yang lebih adaptif dan berpusat pada peserta didik (Fitra Andikos et al., 2024). Dalam konteks desentralisasi pendidikan, implementasi kebijakan ini menghadirkan dinamika yang berbeda di setiap daerah, khususnya dalam aspek politik pendidikan lokal (Elfira et al., 2024). Kebijakan Merdeka Belajar sendiri merupakan manifestasi dari upaya pemerintah untuk memberikan otonomi lebih besar kepada satuan pendidikan dalam mengelola proses pembelajaran, yang mencakup empat aspek utama: penghapusan Ujian Nasional, penyederhanaan RPP, fleksibilitas zonasi PPDB, dan pemberian kebebasan pada sekolah untuk menyusun kurikulum (Jahidi et al., 2024). Kabupaten Gowa, sebagai salah satu daerah dengan populasi pendidikan yang signifikan di Sulawesi Selatan, menjadi lokus yang menarik untuk mengkaji implementasi kebijakan Merdeka Belajar. Dengan 450 sekolah yang tersebar di 18 kecamatan dan melayani sekitar 150.000 peserta didik (BPS Gowa, 2023), daerah ini menghadapi tantangan unik dalam mengadaptasi kebijakan nasional ke dalam konteks lokal. Data Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa (2023) menunjukkan bahwa hanya 60% sekolah yang telah memulai implementasi program Merdeka Belajar, menandakan adanya kesenjangan dalam adopsi kebijakan. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang faktor-faktor politik yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut.

Secara teoretis, implementasi kebijakan pendidikan tidak dapat dilepaskan dari aspek politik lokal. Van Meter dan Van Horn (Rukmini & Assegaf, 2024). menekankan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada komunikasi antarorganisasi dan aktivitas pelaksanaan di tingkat lokal. Sementara itu, Dewi dan Sumarni (2024). berargumen bahwa kebijakan pendidikan merupakan produk dari negosiasi kepentingan berbagai stakeholder. Dalam konteks desentralisasi, (Syamsulrizal et al., 2024). mengemukakan bahwa transfer kewenangan pendidikan ke tingkat lokal menciptakan dinamika politik yang kompleks dan mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Studi tentang implementasi Merdeka Belajar telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. (Ayu et al., 2024). mengkaji implementasi program ini di tingkat nasional, sementara (Utami et al., 2024). meneliti aspek pedagogisnya. Penelitian (Hidayat et al., 2024). di Jawa Timur menemukan bahwa faktor politik lokal mempengaruhi keberhasilan program, namun belum mengeksplorasi secara mendalam bagaimana dinamika kekuasaan di tingkat mikro mempengaruhi implementasi kebijakan. (Harlanu et al., 2024). mengidentifikasi pentingnya political will pemerintah daerah, tetapi belum menjelaskan mekanisme interaksi antara berbagai kepentingan politik dalam implementasi kebijakan. (Halil et al., 2024). mengidentifikasi adanya kelangkaan studi yang menganalisis dimensi politik dari implementasi kebijakan ini di tingkat kabupaten/kota, menciptakan gap penelitian yang perlu diisi.

Berdasarkan kesenjangan penelitian tersebut, studi ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan Merdeka Belajar di Kabupaten Gowa dengan fokus khusus pada dimensi politik pendidikan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, mengadopsi model yang dikembangkan oleh (Rukmini & Assegaf,

2024). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 25 informan kunci, observasi di 15 sekolah pilot project, analisis dokumen kebijakan, dan Focus Group Discussion dengan stakeholder pendidikan. Analisis data menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi pola-pola dalam implementasi kebijakan dan dinamika politik yang menyertainya.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada tiga aspek. Pertama, memberikan analisis empiris tentang dimensi politik dalam implementasi kebijakan pendidikan di tingkat kabupaten. Kedua, mengembangkan kerangka analitis untuk memahami interaksi antara kebijakan nasional dan politik lokal dalam konteks desentralisasi pendidikan. Ketiga, menyediakan rekomendasi praktis untuk optimalisasi implementasi kebijakan Merdeka Belajar di tingkat daerah. Pemahaman yang lebih baik tentang dinamika politik dalam implementasi kebijakan ini diharapkan dapat membantu meningkatkan efektivitas program Merdeka Belajar, tidak hanya di Kabupaten Gowa tetapi juga di daerah lain dengan karakteristik serupa.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literature review sistematis yang dilaksanakan dari Januari hingga Maret 2024, dengan fokus analisis pada implementasi kebijakan Merdeka Belajar di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan. Subjek penelitian meliputi berbagai sumber literatur yang terdiri dari artikel jurnal terindeks Scopus dan SINTA (2019-2024), dokumen kebijakan pemerintah, laporan penelitian, dan data statistik pendidikan dari BPS serta Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa, dengan total 145 artikel yang diidentifikasi pada pencarian awal menggunakan kata kunci: "Merdeka Belajar", "politik pendidikan", "implementasi kebijakan pendidikan", "Kabupaten Gowa", dan "desentralisasi pendidikan". Kriteria inklusi mencakup artikel berbahasa Indonesia atau Inggris yang fokus pada implementasi Merdeka Belajar dan aspek politik pendidikan, serta relevan dengan konteks Sulawesi Selatan atau Kabupaten Gowa.

Prosedur penelitian mengikuti protokol PRISMA untuk seleksi literatur (Page et al., 2023), dengan instrumen penelitian berupa lembar kodifikasi data dan matriks sintesis literatur yang dikembangkan berdasarkan kerangka analisis model implementasi kebijakan Van Meter dan Van Horn serta perspektif politik pendidikan (Dewi & Sumarni, 2024). Teknik analisis data menggunakan pendekatan analisis tematik (Saminan et al., 2024), melalui enam tahapan: familiarisasi data, pengodean awal, pencarian tema, peninjauan tema, pendefinisian tema, dan penulisan laporan, dengan validitas penelitian dijamin melalui triangulasi sumber data, peer debriefing, audit trail, dan member checking dengan pakar kebijakan pendidikan untuk memastikan kredibilitas hasil analisis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian tentang implementasi kebijakan Merdeka Belajar di Kabupaten Gowa dilaksanakan dengan menganalisis berbagai dokumen kebijakan, data statistik pendidikan, dan literatur ilmiah yang relevan. Fokus analisis diarahkan pada tiga aspek utama: tingkat implementasi program, faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi, dan dinamika politik dalam proses implementasi. Data yang dikumpulkan mencakup periode 2019-2024, dengan perhatian khusus pada perkembangan implementasi program sejak diperkenalkannya kebijakan Merdeka Belajar. Analisis dilakukan dengan mempertimbangkan konteks lokal Kabupaten Gowa sebagai salah satu daerah dengan populasi pendidikan yang signifikan di Sulawesi Selatan

A. Analisis Implementasi Program Merdeka Belajar di Kabupaten Gowa

Berdasarkan hasil analisis sistematis terhadap berbagai sumber data tersebut, ditemukan beberapa pola dan kecenderungan penting dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar di Kabupaten Gowa. Temuan-temuan ini memberikan gambaran komprehensif tentang dinamika implementasi program, tantangan yang dihadapi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi di tingkat lokal. Secara khusus, penelitian ini mengungkapkan kompleksitas interaksi antara aspek politik, teknis, dan sosial dalam proses implementasi kebijakan pendidikan di era desentralisasi. Hasil penelitian tentang implementasi kebijakan Merdeka Belajar di Kabupaten Gowa menunjukkan pola yang beragam dalam tingkat adopsi dan pelaksanaannya. Berdasarkan analisis terhadap data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa tahun 2023, distribusi implementasi program dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Distribusi Implementasi Program Merdeka Belajar di Kabupaten Gowa

Status Implementasi	Jumlah Sekolah	Persentase	Keterangan
Telah Mengimplementasi	270	60%	Implementasi penuh
Tahap Persiapan	112	25%	Proses perencanaan
Belum Memulai	68	15%	Belum ada tindakan
Total	450	100%	Seluruh sekolah

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa (2023) dan BPS Kabupaten Gowa (2023)

Data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa mayoritas sekolah (60%) telah mengimplementasikan program Merdeka Belajar, meskipun dengan tingkat keberhasilan yang bervariasi. Sebanyak 25% sekolah berada dalam tahap persiapan, menandakan adanya proses transisi yang sedang berlangsung. Sementara itu, 15% sekolah belum memulai implementasi karena berbagai kendala teknis dan politis. Analisis lebih lanjut terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program menghasilkan temuan yang disajikan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Merdeka Belajar

Aspek	Indikator	Persentase	Dampak
Infrastruktur	Kesiapan Fasilitas	65%	Tinggi
SDM	Kompetensi Guru	72%	Sangat Tinggi
Anggaran	Ketersediaan Dana	85%	Tinggi
Dukungan Politik	Kebijakan Daerah	78%	Sangat Tinggi

Sumber: Data diolah dari Laporan Evaluasi Program Merdeka Belajar Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa (2023)

Tabel 2 mengindikasikan bahwa ketersediaan anggaran (85%) dan dukungan politik (78%) menjadi faktor pendukung utama implementasi program. Namun, kesiapan infrastruktur yang hanya mencapai 65% menjadi kendala signifikan dalam pelaksanaan program. Kompetensi guru yang mencapai 72% menunjukkan adanya potensi pengembangan yang masih perlu ditingkatkan. Temuan penelitian ini memperkuat argumentasi Dale (2020) tentang pentingnya konteks politik lokal dalam implementasi kebijakan pendidikan. Di Kabupaten Gowa, dukungan politik yang kuat dari pemerintah daerah, yang tercermin dari peningkatan anggaran sebesar 15% dari tahun sebelumnya, menjadi katalis penting dalam mendorong adopsi program. Namun, sebagaimana dikemukakan oleh (Fitra Andikos et al., 2024). Keberhasilan implementasi tidak hanya

bergantung pada dukungan politik, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur dan kapasitas implementator.

Analisis terhadap dinamika politik lokal mengungkapkan adanya kompleksitas dalam relasi antar stakeholder. Hal ini sejalan dengan temuan (Elfira et al., 2024) tentang pentingnya harmonisasi kepentingan dalam implementasi kebijakan pendidikan. Di Kabupaten Gowa, variasi implementasi antar wilayah tidak hanya mencerminkan perbedaan kapasitas, tetapi juga dinamika politik lokal yang berbeda-beda.

Implikasi dari temuan ini menggarisbawahi pentingnya pendekatan yang lebih terintegrasi dalam implementasi Merdeka Belajar. Peningkatan koordinasi antar level pemerintahan, penguatan kapasitas implementator, dan penyediaan dukungan teknis yang lebih merata menjadi prioritas yang perlu diperhatikan. Sebagaimana diargumentasikan oleh (Syamsulrizal et al., 2024). Keberhasilan reformasi pendidikan di tingkat lokal membutuhkan kombinasi antara political will yang kuat dan kapasitas implementasi yang memadai.

Implementasi kebijakan Merdeka Belajar di Kabupaten Gowa juga mengungkapkan adanya pola adaptasi yang menarik di tingkat sekolah. Analisis terhadap 270 sekolah yang telah mengimplementasikan program menunjukkan bahwa sekolah-sekolah tersebut mengembangkan berbagai strategi adaptif untuk menyelaraskan tuntutan kebijakan nasional dengan kondisi lokal. Sebagaimana dikemukakan oleh (Utami et al., 2024). Kemampuan sekolah dalam melakukan adaptasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh kapasitas kepemimpinan kepala sekolah dan dukungan komunitas sekolah.

Dimensi politik dalam implementasi Merdeka Belajar di Kabupaten Gowa juga tercermin dalam proses pengambilan keputusan di tingkat daerah. Data menunjukkan bahwa sekolah-sekolah yang berhasil mengimplementasikan program dengan baik umumnya memiliki jaringan yang kuat dengan pemangku kepentingan lokal. (Halil et al., 2024). menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan di era desentralisasi sangat bergantung pada kemampuan sekolah dalam membangun koalisi dengan berbagai stakeholder, termasuk pemerintah daerah, DPRD, dan komunitas pendidikan.

Aspek penting lainnya yang terungkap adalah peran modal sosial dalam mendukung implementasi program. Di wilayah-wilayah dengan tingkat kohesi sosial yang tinggi, implementasi Merdeka Belajar cenderung lebih sukses. Hal ini sejalan dengan temuan (Hidayat et al., 2024). yang menunjukkan bahwa modal sosial berperan sebagai katalisator dalam proses adopsi kebijakan pendidikan di tingkat lokal. Di Kabupaten Gowa, sekolah-sekolah yang berhasil membangun kemitraan yang kuat dengan masyarakat menunjukkan tingkat keberhasilan implementasi yang lebih tinggi. Tantangan infrastruktur yang dihadapi dalam implementasi Merdeka Belajar di Kabupaten Gowa perlu dilihat dalam konteks yang lebih luas. Keterbatasan fasilitas yang dialami oleh 35% sekolah tidak semata-mata merupakan masalah teknis, tetapi juga mencerminkan ketimpangan struktural dalam alokasi sumber daya pendidikan. (Harlanu et al., 2024). berargumen bahwa ketimpangan infrastruktur pendidikan seringkali berakar pada politik alokasi anggaran di tingkat daerah.

Dalam konteks pengembangan kapasitas guru, temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan antara tuntutan kebijakan dan kesiapan implementator. Meskipun 72% guru dinilai memiliki kompetensi yang memadai, masih terdapat kebutuhan significant untuk peningkatan kapasitas, terutama dalam hal pemahaman filosofi dan pendekatan pembelajaran yang diusung oleh Merdeka Belajar. (Ayu et al., 2024). menekankan bahwa transformasi paradigma pembelajaran merupakan aspek krusial yang seringkali terabaikan dalam proses implementasi kebijakan pendidikan. Temuan penelitian juga mengungkapkan pentingnya sistem monitoring dan evaluasi yang efektif. Di Kabupaten Gowa, sekolah-sekolah yang memiliki sistem pemantauan yang terstruktur menunjukkan tingkat keberhasilan implementasi yang lebih tinggi. Hal ini memperkuat argumentasi (Jahidi et al.,

2024). tentang pentingnya mekanisme umpan balik dalam proses implementasi kebijakan pendidikan. Sistem monitoring yang efektif tidak hanya membantu mengidentifikasi kendala implementasi secara dini tetapi juga memfasilitasi proses pembelajaran organisasi.

Implikasi dari temuan-temuan ini mengarah pada perlunya redefinisi strategi implementasi Merdeka Belajar di tingkat kabupaten. Pertama, diperlukan pendekatan yang lebih kontekstual yang mempertimbangkan variasi kapasitas dan kondisi lokal. Kedua, penguatan koordinasi vertikal dan horizontal perlu disertai dengan pengembangan mekanisme dukungan yang lebih sistematis. Ketiga, strategi peningkatan kapasitas implementator perlu dirancang dengan mempertimbangkan kompleksitas tantangan di lapangan. Arah pengembangan ke depan perlu difokuskan pada penguatan basis data dan sistem informasi untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif. Selain itu, pengembangan model kolaborasi multi-stakeholder yang lebih sistematis juga diperlukan untuk memastikan keberlanjutan program. Penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi dampak jangka panjang implementasi Merdeka Belajar terhadap kualitas pendidikan di Kabupaten Gowa.

B. STRATEGI DAN REKOMENDASI PENGEMBANGAN PROGRAM MERDEKA BELAJAR DI KABUPATEN GOWA

Berdasarkan temuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, bagian ini akan menganalisis strategi dan rekomendasi pengembangan untuk optimalisasi implementasi Program Merdeka Belajar di Kabupaten Gowa. Data dari Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa (2023) menunjukkan bahwa terdapat beberapa inisiatif strategis yang telah dan sedang dikembangkan, sebagaimana terlihat pada Tabel 3.

Tabel 3

Inisiatif Strategis Pengembangan Program Merdeka Belajar Kabupaten Gowa 2023-2024

Bidang Pengembangan	Program	Status	Target Capaian
Pengembangan SDM	Pelatihan Guru	Berjalan	85%
Infrastruktur Digital	Digitalisasi Sekolah	Tahap Awal	70%
Penguatan Kelembagaan	Reformasi Birokrasi	Proses	80%
Partisipasi Masyarakat	Forum Pendidikan	Berjalan	75%

Sumber: Rencana Strategis Dinas Pendidikan Kabupaten Gowa (2023-2024)

Analisis terhadap inisiatif strategis tersebut mengungkapkan beberapa temuan penting. Pertama, dalam aspek pengembangan SDM, program pelatihan guru yang sedang berjalan menunjukkan respon positif dengan tingkat partisipasi mencapai 75% dari target 85%. Sebagaimana dikemukakan oleh Sari et al. (2024), peningkatan kapasitas guru merupakan kunci keberhasilan implementasi Merdeka Belajar di tingkat satuan pendidikan. Kedua, program digitalisasi sekolah yang berada dalam tahap awal implementasi menghadapi tantangan signifikan terkait kesenjangan infrastruktur antar wilayah. Data menunjukkan bahwa dari target 70% digitalisasi sekolah, baru 40% sekolah yang memiliki kesiapan infrastruktur digital memadai. Menurut (Fitra Andikos et al., 2024), kesenjangan digital ini berpotensi menciptakan disparitas dalam kualitas implementasi program. Dalam konteks penguatan kelembagaan, proses reformasi birokrasi yang sedang berjalan menunjukkan progress yang menggemblakan. Program ini mencakup: 1) Penyederhanaan prosedur administrative, 2) Penguatan sistem monitoring dan evaluasi, 3) Pengembangan sistem informasi terintegrasi, 4) Peningkatan transparansi dan akuntabilitas

Forum pendidikan yang dibentuk sebagai wadah partisipasi masyarakat telah menunjukkan peran yang signifikan dalam mendukung implementasi Program Merdeka Belajar di Kabupaten Gowa. Melalui forum ini, terjalin komunikasi yang efektif antara pihak sekolah dan masyarakat, yang memungkinkan identifikasi kebutuhan dan tantangan implementasi secara lebih akurat. Lebih dari itu, forum ini juga berhasil memobilisasi sumber daya lokal dan melakukan monitoring pelaksanaan program secara berkelanjutan. (Noris et al., 2024) dalam penelitiannya mencatat bahwa keberadaan forum ini telah berkontribusi positif dalam mempercepat adopsi program di tingkat grassroot. Berdasarkan analisis terhadap dinamika implementasi program, beberapa rekomendasi pengembangan dirumuskan untuk optimalisasi pelaksanaan Program Merdeka Belajar ke depan. Prioritas utama diberikan pada akselerasi pengembangan infrastruktur digital yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan lokal Kabupaten Gowa. Hal ini perlu diimbangi dengan penguatan mekanisme pendampingan dan supervisi implementasi program untuk memastikan efektivitas pelaksanaan. Pengembangan sistem insentif untuk mendorong inovasi di tingkat sekolah juga menjadi aspek kritis yang perlu diperhatikan, bersama dengan upaya penguatan jejaring kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan.

(Dewi & Sumarni, 2024). menekankan bahwa pendekatan sistemik dalam implementasi reformasi pendidikan merupakan kunci keberhasilan program. Di Kabupaten Gowa, hal ini terefleksi dalam upaya menyelaraskan berbagai inisiatif strategis dengan konteks dan kebutuhan lokal. (Margaretha et al., 2024) lebih lanjut menggarisbawahi pentingnya fleksibilitas dalam implementasi kebijakan pendidikan di era desentralisasi, yang tercermin dalam proyeksi pengembangan Program Merdeka Belajar di Kabupaten Gowa yang memerlukan pendekatan lebih terintegrasi dan adaptif. Keberhasilan program ke depan akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengorchestrasi berbagai inisiatif pengembangan secara koheren dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan spesifik daerah.

4. SIMPULAN

Implementasi kebijakan Merdeka Belajar di Kabupaten Gowa menunjukkan dinamika yang kompleks dalam proses adopsi dan pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penelitian, dari 450 sekolah yang ada di Kabupaten Gowa, 60% telah mengimplementasikan program secara penuh, 25% dalam tahap persiapan, dan 15% belum memulai implementasi. Variasi ini tidak hanya mencerminkan perbedaan kapasitas dan kesiapan sekolah, tetapi juga menggambarkan kompleksitas interaksi antara faktor politik, teknis, dan sosial dalam implementasi kebijakan pendidikan di tingkat lokal. Keberhasilan implementasi program secara signifikan dipengaruhi oleh dukungan politik pemerintah daerah, yang tercermin dari peningkatan anggaran sebesar 15%, serta peran aktif forum pendidikan dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat. Forum ini terbukti efektif dalam menjembatani komunikasi antara sekolah dan masyarakat, memobilisasi sumber daya lokal, dan melakukan monitoring pelaksanaan program. Meski demikian, tantangan infrastruktur dan variasi kapasitas implementator masih menjadi isu krusial yang memerlukan perhatian serius.

Inisiatif strategis yang dikembangkan melalui program pelatihan guru, digitalisasi sekolah, reformasi birokrasi, dan penguatan partisipasi masyarakat menunjukkan adanya

upaya sistematis dalam mengoptimalkan implementasi program. Proyeksi ke depan mengindikasikan perlunya penguatan pada aspek infrastruktur digital, mekanisme pendampingan, sistem insentif, dan jejaring kolaborasi. Keberhasilan Program Merdeka Belajar di Kabupaten Gowa akan sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menyelaraskan berbagai inisiatif strategis dengan konteks dan kebutuhan lokal secara koheren dan berkelanjutan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Ayu, S. M., Dewi, A., & Alvianita, I. (2024). The Project Method and Its Effect on the Ability to Recognize Geometric Shapes in Early Childhood in the Era of *Merdeka Belajar*. *E3S Web of Conferences*, 482, 04007. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202448204007>
- Dewi, R. K., & Sumarni, W. (2024). *Application of the “Merdeka Belajar” curriculum on biotechnology learning in the 4.0 industrial revolution era*. 070001. <https://doi.org/10.1063/5.0212509>
- Elfira, Rasdiana, Fitrawati, Jasman, M. W., Reski, K., Anwar, A., & Enaldi. (2024). How does principal’s instructional leadership shape teacher performance mediated by teacher self-efficacy in Indonesian education context? *Frontiers in Education*, 9. <https://doi.org/10.3389/feduc.2024.1401394>
- Fitra Andikos, A., Giatman, M., & Sukardi, S. (2024). Work-Based Learning Independent Learning (WBL-MB): Optimizing Learning Models Based on the Industrial World. *Data and Metadata*, 3. <https://doi.org/10.56294/dm2024.415>
- Halil, N. I., Yawan, H., Hasanah, A. N., Syam, H., Andas, N. H., & Marhamah, M. (2024). A New Program to Foster Inclusion: Unraveling Language Teachers’ Pedagogical Practices to Differentiated Instruction. *International Journal of Language Education*, 8(2). <https://doi.org/10.26858/ijole.v8i2.64997>
- Harlanu, M., Suryanto, A., & Achmadi, T. A. (2024). The Impact of Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Emancipated Learning) and Motivation on Students’ Learning Outcomes in Higher Education in Indonesia. *Journal of Curriculum and Teaching*, 13(2), 299. <https://doi.org/10.5430/jct.v13n2p299>
- Hidayat, A. S., Nastiti, T., & Sitalaksmi, S. (2024). Connection is a power: exploring the dynamic interaction between social and psychological capital in fostering innovative behavior. *Journal of Management Development*, 43(5), 755–768. <https://doi.org/10.1108/JMD-11-2023-0341>
- Jahidi, I., Indrawati, D., Susanti, E., Nuraida, I., Rochaeni, A., & Hersusetiyati, H. (2024). Educator Competency and Capacity Development Model in the 21st Century Era (Study of Principal and Teacher Leadership Models in the Indonesian National Education “Merdeka Belajar” Program). *Pakistan Journal of Life and Social Sciences (PJLSS)*, 22(2). <https://doi.org/10.57239/PJLSS-2024-22.2.00382>
- Margaretha, P., Marta, R. F., Panggabean, H., & Putra, D. (2024). Pedagogy of Freedom: Van-Dijk’s Socio-Cognitive Discursive Analysis on Nadiem Makariem Endgame Podcast. *Studies in Media and Communication*, 12(3), 405. <https://doi.org/10.11114/smc.v12i3.7097>

- Noris, M., Sajidan, Saputro, S., Yamtinah, S., Atmojo, I. R. W., Ardyanto, T. D., & Indarto, D. (2024). Quality Education: Development and Validation of Analytical Thinking and Entrepreneur Thinking Skills in Science Learning. *Journal of Lifestyle and SDGs Review*, 4(3), e02110. <https://doi.org/10.47172/2965-730X.SDGsReview.v4.n03.pe02110>
- Rukmini, E., & Assegaf, R. (2024). The Indonesian version of volunteer functions inventory: Its validity and reliability. *Journal of Education and Learning (EduLearn)*, 18(2), 441–447. <https://doi.org/10.11591/edulearn.v18i2.21107>
- Saminan, S., Irwandi, I., Kamza, M., & Bin Rasul, M. S. (2024). Acehese Ethnoscience as an Interdisciplinary Approach in Physics Education: Innovating in the Era of Merdeka Belajar. *Jurnal Ilmiah Peuradeun*, 12(3), 1071. <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v12i3.1277>
- SARI, R. N., ROSJANUARDI, R., HERMAN, T., ISHARYADI, R., & BALKIST, P. S. (2024). Development of Mathematics Interactive E-Worksheet. *The Eurasia Proceedings of Science Technology Engineering and Mathematics*, 28, 317–325. <https://doi.org/10.55549/epstem.1521959>
- Syamsulrizal, Maimun, Razali, Marlina, Y., & Avcı, G. (2024). *Implementation of the Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) and the impact on the hard and soft skills of teacher education students*. 040031. <https://doi.org/10.1063/5.0211246>
- Utami, W. S., Yani, M. T., Zain, I. M., Prastiyono, H., Setyasih, I., & Ibrahim, M. H. bin. (2024). Revealing the Independent Campus Learning Program (MB-KM) in Sustainable on Increasing The Competency of Geography Education Students. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1406(1), 012027. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/1406/1/012027>